

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Krisis ekonomi global kini tengah melanda dunia. Negara besar seperti Amerika pun tengah dilanda resesi besar-besaran. Pasar modal dunia tergoncang. Tidak hanya negara-negara besar yang terkena imbasnya, Negara-negara di belahan dunia lainnya juga terkena dampaknya. Terutama bagi negara-negara berkembang dan perekonomian yang kurang kuat, tentu hal ini menjadi momok yang menakutkan. Indonesia sebagai negara berkembang tidak bisa luput dari pengaruh krisis ekonomi global walaupun dapat dikatakan fundamental perekonomian Indonesia bisa diindikasikan cukup baik.

Dalam bidang ekonomi Indonesia bukanlah negara kaya diantara negara-negara Asia Tenggara. Bahkan dapat dikatakan perkembangannya jauh di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya. Hal ini menjadi salah satu dasar bagi Indonesia tentang perlunya berperan aktif dalam kerjasama atau forum-forum yang banyak membahas mengenai permasalahan dunia baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Indonesia dengan pasar berkembangnya sangat tergantung pada kondisi ekonomi eksternal, sehingga ketika terjadi krisis global, perekonomian Indonesia pun tidak luput dari krisis.

Krisis yang terjadi sekarang memiliki dampak yang jauh lebih besar dibandingkan krisis yang pernah melanda Asia pada 1990-an. Dalam forum yang diadakan di Washington DC, Indonesia yang diketahui sebagai negara berkembang yang menjadi peserta dari region ASEAN dalam forum tersebut. Hal ini menjadi salah satu sarana bagi upaya Indonesia untuk menjaga kepentingan nasionalnya dalam forum negara maju dan berkembang tersebut yaitu dengan mengusulkan mekanisme dana bantuan global bagi negara berkembang yang disebut GESF.

Selanjutnya penulis tertarik untuk mengambil judul "Kepentingan Indonesia mengusulkan *Global Expenditure Support Fund* dalam KTT G 20 di Washington DC tahun 2008"

Pada akhirnya, ketersediaan bahan dan sumber data yang diperlukan merupakan faktor pendukung yang sangat penting dan menunjang dalam penelitian ini.

B. Tujuan Penelitian

Kegiatan penulisan ini dimaksudkan untuk

1. Mengembangkan keilmuan dan wawasan intelektual sebagai mahasiswa setelah menerima ilmu-ilmu selama kuliah.
2. Untuk mengkaji dan memberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai kepentingan Indonesia mengusulkan *Global Expenditure Support Fund* dalam KTT G-20 yang dilaksanakan di Washington DC tahun 2008 terutama difokuskan pada kepentingan ekonomi Indonesia

3. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa jenjang S-1, guna memperoleh gelar kesarjanaan.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah ekonomi, ternyata krisis ekonomi sering terjadi di mana-mana melanda hampir semua negara yang menerapkan sistem kapitalisme. Krisis demi krisis ekonomi terus berulang tiada henti sejak tahun 1923, 1930, 1940. 1970, 1980, 1990, dan 1998-2001, bahkan sampai saat ini krisis semakin mengkhawatirkan dengan munculnya krisis finansial di Amerika Serikat.¹

Sebelum krisis ini benar-benar melanda IMF bahkan telah merilis prediksinya mengenai pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin menurun. Krisis itu tidak saja terjadi di Amerika Latin, Asia, Eropa, tetapi juga melanda Amerika Serikat.² Ekonomi global akan melambat menjadi 4,1%. Angka ini turun dari estimasi sebelumnya 4,9%. Ekonomi AS tumbuh 1,5% pada 2008, turun dari sebelumnya 2,2%. Eropa tumbuh 1,3%, lebih rendah prediksi tahun sebelumnya 1,6%. Jepang hanya tumbuh 1,5%, India tumbuh hanya 6,9%, Cina 10% dan negara-negara berkembang rata-rata tumbuh 6,9%.

Krisis yang terjadi di Amerika Serikat bermula ketika diumumkannya kebangkrutan Lembaga Investasi *Lehman Brothers*. Hal

¹ <http://ilhamachmad.wordpress.com/> "Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya Bagi Indonesia". Oleh Ilham Ahmad. Diakses Tanggal 9 Februari 2009.

² <http://www.fact-insure.com/>. "Krisis Ekonomi Global dan Indonesia". Oleh Kaukabus Syarqiyah. Diakses Tanggal 9 Februari 2009

ini tidak bisa dipungkiri telah memberi efek domino, sehingga hampir semua negara di dunia mengalami krisis yang sama. bahkan dampak dari krisis tersebut juga mampu mengguncang bursa-bursa saham yang ada di dunia. Hal ini disebabkan karena Amerika Serikat merupakan salah satu pusat perdagangan dunia.

Krisis ekonomi yang terjadi di negara Amerika Serikat, jika ditinjau dari latar penyebabnya ada beberapa hal, pertama; Agresi Militer Amerika Serikat Ke Irak dan Afganistan. Dengan ambisi yang besar untuk memberantas teroris yang telah meluluhlantakkan Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, yang berhasil menghancurkan *World Trade Centre*, Presiden Amerika bertekad untuk memburu orang yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut dan akan menghancurkannya sampai ke akar-akarnya, dan perang ini sampai sekarang masih terus berlangsung yang membutuhkan banyak dana, sehingga pendanaan negara terfokus pada kedua perang tersebut. Kedua; *Subprime Mortgage* di sektor perumahan. Kata "*mortgage*" berasal dari istilah hukum dalam bahasa Prancis. Artinya: matinya sebuah ikrar. Dalam kasus *Subprime mortgage*,³ Bank-bank komersial dan bank-bank investasi memberikan utang kepada masyarakat dengan mempertaruhkan sektor riil. Utang yang dipinjamkan oleh bank kepada masyarakat bukanlah uang yang dimiliki bank, melainkan uang masyarakat yang dihimpun oleh perbankan.

³ Kredit macet di sektor perumahan, hal ini terjadi karena lembaga pemeringkat kredit memberikan kredit secara berlebihan bahkan kepada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat untuk menerima kredit (*sub-prime*). <http://ilhamachmad.wordpress.com/>"*Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya Bagi Indonesia*". Oleh Ilham Ahmad. Diakses Tanggal 9 Februari 2009.

Permasalahannya, bank komersial tersebut dapat memberikan utang kepada siapa pun melebihi dana simpanan nasabah yang dihimpun oleh bank. Makanya tidak aneh, ketika terjadi *rush* perbankan mana pun di dunia pasti ambruk.

Dalam *mortgage*, seseorang mendapat kredit. Lalu, memiliki rumah. Rumah itu diserahkan kepada pihak yang memberi kredit. Seseorang boleh menempatnya selama cicilan rumah tersebut belum dibayar. Karena rumah itu bukan hak milik, begitu pembayaran *mortgage* macet, rumah itu otomatis tidak bisa ditempati dan harus pergi dari rumah tersebut. Begitu agresifnya para *investment banking* kalau dulu hanya orang yang memenuhi syarat (*prime*) yang bisa dapat *mortgage*, yang kurang memenuhi syarat pun (*sub-prime*) dirangsang untuk minta *mortgage*. Di AS, setiap orang punya rating. Tinggi rendahnya rating ditentukan oleh besar kecilnya penghasilan dan boros-tidaknya gaya hidup seseorang.⁴

Dalam waktu kurang dari 10 tahun, kegagalan bayar mortgage langsung melejit. Rumah yang disita sangat banyak. Rumah yang dijual kian bertambah yang memacu jatuhnya harga rumah ke level yang sangat rendah. Dengan turunnya harga rumah yang tidak sesuai dengan nilai

⁴ Orang yang disebut *prime* adalah yang ratingnya 600 ke atas. Setiap tahun orang bisa memperkirakan sendiri, ratingnya naik atau turun. Kalau sudah mencapai 600, dia sudah boleh bercita-cita punya rumah lewat mortgage. Kalau belum 600, dia harus berusaha mencapai 600. Bisa dengan terus bekerja keras agar gajinya naik atau terus melakukan penghematan pengeluaran. Disisi lain pengusaha ingin perusahaan tumbuh semakin besar dan mendapat laba yang tinggi, pasar pun digelembungkan. Orang yang ratingnya baru 500 sudah ditawarkan mortgage yang seharusnya belum bisa tetapi dipaksakan dengan prinsip bila gagal bayar, rumah itu bisa disita. Setelah rumah disita, bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi dari nilai pinjaman tetapi tidak pernah dipikirkan jangka panjangnya. Ibid.

pinjaman yang menyebabkan semakin banyak yang gagal bayar. Bank atau *investment banking*⁵ yang memberi pinjaman menjaminkan rumah-rumah itu kepada bank atau *investment banking* yang lain, yang lain itupun menjaminkan ke yang lainnya lagi. Sehingga setelah kredit itu macet maka semua lembaga penjamin itu ambruk secara berurutan. Buruknya kinerja lembaga-lembaga keuangan Amerika Serikat ikut berperan besar dalam krisis yang terjadi, dan diperparah dengan laporan badan-badan independen yang seharusnya memberikan analisis objektif mengenai sektor-sektor ekonomi di Amerika Serikat namun juga ikut dimanipulasi sedemikian rupa untuk menciptakan sentimen positif terhadap sektor perumahan tanpa disertai pengamanan ekonomi yang memadai.

Selain itu sikap terlalu percaya diri dari lembaga-lembaga pemberi kredit dalam penyaluran kredit khususnya pada sektor perumahan membuat orang/badan usaha yang memiliki reputasi buruk sekalipun masih mendapatkan kredit yang menyebabkan kredit besar-besaran mengalir begitu saja kepada para kreditor yang bermasalah. Hal ini tentu saja akan memacu timbulnya kredit macet. Kredit macet perumahan tersebut akhirnya melibas dua nama besar perusahaan di sektor finansial, *Merrill Lynch* dan *Lehman Brothers*. Harga saham di bursa saham USA (*Wall Street*) dan dunia mulai mengalami penurunan dan mulai memicu

⁵ Perusahaan yang mirip dengan bank karena perusahaan ini menerima berbagai macam deposito tetapi tidak terikat dengan peraturan-peraturan perbankan.

krisis yang berdampak pada ambruknya bank-bank investasi maupun perusahaan-perusahaan asuransi dunia.⁶

Sebagai sentrum perekonomian dunia, krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat menimbulkan efek domino yang hebat. Bangkrutnya Lehman Brothers langsung mengguncang bursa saham di seluruh dunia. Bursa saham di kawasan Asia seperti di Jepang, Hongkong, China, Australia, Singapura, India, Taiwan dan Korea Selatan, mengalami penurunan drastis 7-10 persen. Termasuk bursa saham di kawasan Timur Tengah, Rusia, Eropa, Amerika Selatan dan Amerika Utara. Tak terkecuali di AS sendiri, para investor di Bursa Wall Street mengalami kerugian besar.

Sebagai negara tujuan ekspor dengan tingkat daya beli paling tinggi di dunia, menurunnya perekonomian Amerika akan berdampak luas terhadap perekonomian negara lain. Logikanya, dengan menurunnya daya beli masyarakat Amerika, maka tingkat permintaan terhadap barang pun akan berkurang sehingga negara-negara dengan volume ekspor yang besar ke Amerika akan mengalami penurunan nilai ekspor. Hal ini akan memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara dengan tujuan ekspor ke Amerika.

Indonesia sebagai negara berkembang juga tidak bisa luput dari pengaruh krisis AS tersebut. Walaupun secara fundamental perekonomian Indonesia bisa diindikasikan cukup baik. Efek dari krisis ini pun lambat

⁶ Ibid.

laun semakin bisa dirasakan, mulai dari melemahnya nilai rupiah terhadap dollar AS, berkurangnya volume ekspor, menurunnya harga-harga komoditi yang biasa diekspor dan naiknya harga komoditi import serta mulai terancam di PHK ribuan karyawan/buruh perusahaan.

Seperti diketahui bersama krisis keuangan global telah berdampak luas terhadap perekonomian negara-negara di dunia. Saat ini adalah moment sulit dan di luar dugaan perekonomian dunia. Kondisi pasar keuangan dunia benar-benar tertekan. Pertumbuhan perekonomian dunia menghadapi resiko serius. Negara-negara Ekonomi terbesar dunia amat merasakan dampak itu. Di Amerika Serikat sendiri keuangan negara Adi Kuasa tersebut mengalami tantangan luar biasa dan hal tersebut menambah tekanan lebih besar terhadap perekonomian negara tersebut yang memang sudah melambat. Perkembangan ini mempengaruhi dunia. Indonesia dan negara-negara dengan pasar yang terus berkembang telah mengambil langkah mengesankan beberapa tahun terakhir dalam memperkuat fundamental ekonominya, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan melindungi diri terhadap guncangan dari luar. Namun seperti yang terlihat beberapa pekan terakhir ini, negara-negara dengan pasar terus berkembang pun tidak kebal terhadap tekanan krisis keuangan global. Bahkan pasar keuangan yang tidak langsung berhubungan dengan resiko aset kredit perumahan-pun menjadi kian tidak stabil akibat semakin rendahnya kepercayaan pasar, melambatnya pertumbuhan ekspor, dan berbagai perusahaan disubsidi secara berlebihan

Krisis yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia ini membuat para pemimpin negara bergabung untuk mencari solusi untuk berupaya mengatasi krisis tersebut melalui pertemuan G 20 (*The Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors* atau kelompok Duapuluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral.⁷ Pertemuan ini dilaksanakan di Washington DC pada tanggal 15 November 2008. Pertemuan tersebut dihadiri oleh kepala pemerintahan dari masing-masing negara maju dan berkembang. Forum ini secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu pokok perekonomian dunia, dalam hal ini adalah krisis ekonomi global.

Secara resmi G-20 dibentuk pada tahun 1999. Forum ini pada awalnya dibentuk karena terjadinya krisis pada tahun 1998 dan merupakan pendapat yang muncul dari forum G-7. G-7 sendiri didirikan tahun 1976 sebagai forum informal dari tujuh negara industri utama yaitu Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Pertemuan itu dirasa kurang efektif karena tidak melibatkan kekuatan-kekuatan ekonomi lain sehingga keputusan-keputusan yang dibuat tidak memiliki pengaruh yang lebih besar dan mendengarkan kepentingan-kepentingan yang barangkali tidak tercakup dalam kelompok itu. G-20 dianggap lebih merupakan perwakilan dari berbagai negara di berbagai tahap pembangunan. Konsensus memberikan hasil yang lebih besar daripada G-

⁷ [http://id.wikipedia.org/wiki/'G-20 Ekonomi Utama'](http://id.wikipedia.org/wiki/'G-20_Ekonomi_Utama'). Diakses Tanggal 9 Februari 2009

7. Kelompok ini menghimpun hampir 90% GNP dunia, 80% total perdagangan dunia dan dua per tiga penduduk dunia.⁸

Sebagai forum ekonomi, G 20 lebih banyak menjadi ajang konsultasi dan kerjasama hal-hal yang berkaitan dengan sistem moneter internasional. Terdapat pertemuan yang teratur untuk mengkaji, meninjau dan mendorong diskusi diantara negara industri maju dan sedang berkembang yang terkemuka mengenai kebijakan-kebijakan yang mengarah pada stabilitas keuangan internasional dan mencari upaya-upaya pemecahan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara tertentu saja. Anggota dari G 20 terdiri dari Kelompok negara-negara maju dan berkembang. Negara dengan pendapatan tinggi (*Upper Income*) yaitu: Australia, Kanada, RRC, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, Uni Eropa dan Amerika Serikat yang kemudian disebut negara maju, negara pendapatan menengah-atas (*Upper Middle Income/UMC*): Argentina, Brazil, Meksiko, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, serta negara pendapatan rendah (*Low Income/LIC*): Indonesia dan India yang disebut negara berkembang. Negara dikatakan berkembang adalah apabila negara tersebut memiliki tingkat pendapatan rendah (di bawah \$755), menengah-bawah (antara \$756- \$2995), dan menengah-atas(antara \$2996-\$9265).⁹

⁸ ibid

⁹ Dikutip dari buku berjudul "Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga". 2003. Michael P Todaro dan Stephen C Smith. Jakarta: Erlangga. Hal. 41

Agenda utama dari KTT G 20 adalah untuk menyelesaikan krisis finansial global.¹⁰ Seperti halnya pertemuan G 20 tahun-tahun sebelumnya, sebelum dilakukan pertemuan tingkat kepala negara, digelar pertemuan tingkat menteri keuangan dan gubernur bank sentral. Pertemuan tersebut dilangsungkan di Sao Paulo, Brazil. Dalam kesepakatan bersama Sao Paulo terdapat beberapa poin yang menjadi titik penekanan. Antara lain penanganan krisis harus diimbangi mitigasi dampak sosial. Perlu dilakukan peningkatan regulasi dan pengawasan terhadap lembaga keuangan, termasuk lembaga pemeringkat kredit. Selain itu, institusi keuangan perlu menciptakan insentif untuk mendorong stabilitas ekonomi. Otoritas keuangan juga harus mencegah praktik yang penuh risiko berlebihan dan diperlukan koordinasi antarnegara. Terakhir, perlu dilakukan reformasi lembaga Bretton Woods, yaitu Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia secara menyeluruh. Sementara peran negara berkembang diperbesar.¹¹

Selain itu, pertemuan tingkat menteri juga mendorong peningkatan regulasi dan pengawasan terhadap lembaga keuangan dan aktor keuangan lainnya, termasuk lembaga pemeringkat kredit. Selanjutnya, institusi keuangan perlu menciptakan insentif untuk mendorong stabilitas, sedangkan otoritas keuangan harus mengambil langkah tegas untuk

¹⁰ <http://beritasore.com/2008/11/17>. "Reformasi Sistem Keuangan Global dan Usulan Indonesia di G 20". Oleh Doddy Ardiansyah. Diakses tanggal 9 Februari 2009

¹¹ <http://metronews.com>. "Indonesia Usung Tiga Poin di KTT G 20". Diakses tanggal 9 Februari 2009

mencegah *risk taking* yang berlebihan.¹² Secara konkret, melalui *Indonesian papers* Indonesia mendorong pembentukan mekanisme dukungan pendanaan pembangunan bagi negara berkembang yang krisis, berupa mekanisme dana pendukung pengeluaran global (*Global Expenditure Support Fund/GESF*), hal ini disampaikan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam forum G-20 di Washington DC pada tanggal 15-16 November 2008. Mekanisme GESF merupakan mekanisme dana bantuan bagi negara-negara berkembang dari lembaga internasional agar negara berkembang tetap dapat melakukan *counter cyclical policy*¹³.

Seperti diketahui sifat pasar Indonesia yang terbuka menyebabkan pasar Indonesia tergantung dengan kondisi eksternal, sehingga memburuknya kondisi perekonomian eksternal akan berdampak pada pasar domestik Indonesia. Oleh karena itu upaya pemerintah untuk membantu peningkatan aktifitas ekonomi dalam negeri dapat dilakukan sebagai upaya antisipasi dampak krisis yang semakin dalam. Misalnya; membantu sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) merupakan usaha yang dominan di Indonesia yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional sehingga pemerintah mengupayakan pemberian dana bagi sektor tersebut, di antaranya pemberian bantuan teknis bagi UMKM baik dalam pelatihan, pemberian informasi maupun penelitian, dan memberikan insentif pajak bagi UMKM yang berorientasi ekspor, selain itu pemerintah juga membantu mengatasi permasalahan di

¹² *ibid*

¹³ http://www.wartaekonomi.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1491:counter-cyclical&catid=53:aumum. Diakses tanggal 14 Juli 2009

sektor ini diantaranya menyangkut keterbatasan modal, SDM, pengembangan produk. Dengan adanya peningkatan dalam aktifitas UMKM tersebut dapat membantu menggerakkan sektor perekonomian diantaranya ekspor dan para eksportir akan memarkirkan valasnya di bank nasional agar supaya cadangan devisa untuk menopang impor dapat terjaga. Karena pasar ekspor Indonesia ke negara Amerika dan AS terganggu adanya krisis global maka perlu untuk membuka pasar ekspor baru di luar AS dan Eropa, di antaranya Timur Tengah, Tiongkok, Uni Emirat Arab untuk komoditas barang dari kulit, garmen dan tekstil serta elektronik,¹⁴ walaupun membuka pasar baru untuk ekspor tidaklah mudah. Namun dengan koordinasi di antara Pemerintah, Departemen Luar negeri, Departemen Perdagangan, Departemen perindustrian, Pemda dan Kadin secara intensif sehingga menjadi pasar ekspor Indonesia yang prospektifHal ini diperlukan untuk menjaga likuiditas negara berkembang dengan akses keuangan melalui fasilitas likuiditas dari lembaga multilateral.

Dengan berbagai dampak yang ditimbulkan dari krisis global diantaranya; melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, perlambatan pertumbuhan ekonomi, tingginya inflasi, menurunnya volume ekspor dan impor serta untuk menjalankan *counter cyclical policy*. Kebijakan ini akan dijalankan beberapa tahun kedepan dimana kebijakan tersebut membutuhkan biaya yang semakin mahal terutama bagi negara-

¹⁴ <http://www.mudrajad.com/upload/Srategi%Penyelamatan%20Sektor%20Riiil%20241208.pdf>.
Diakses Tanggal 1 April 2009

negara berkembang yang memiliki kapasitas fiskal yang terbatas dapat mengganggu kestabilan anggaran negara, apalagi aliran modal global diperkirakan akan menyusut sekitar 400 miliar dollar AS,¹⁵ sehingga semakin sulit untuk mencari pembiayaan di pasar.

Oleh karena itu Indonesia mengusulkan mekanisme dana pendukung pengeluaran global (GESF) untuk mengantisipasi apabila menghadapi masalah pembiayaan dalam melakukan *counter cyclical policy* untuk menjaga pertumbuhan ekonomi domestik. Mekanisme dana bantuan tersebut diberikan dengan persyaratan yang tidak berlebihan dan dapat dicairkan dalam waktu yang singkat serta dengan tingkat bunga yang wajar. Karena persyaratan yang mengikat akan memberatkan dan menyulitkan negara berkembang.

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang penulis kemukakan adalah "Mengapa Indonesia mengusulkan dana pendukung pengeluaran global (*Global Expenditure Support Fund*) dalam KTT G 20 di Washington DC Tahun 2008?"

E. Kerangka Dasar Teoretik

Sesuai dengan permasalahan diatas, penulis akan menggunakan kerangka berfikir yang mendukung dalam pembahasan selanjutnya yaitu Konsep Kepentingan Nasional dan Collective Bargaining

¹⁵ <http://www.koran-jakarta.com/veroz/detail=news.php?id=4192&&idkat=55>. Diakses tanggal 14 Juli 2009

1. Konsep Kepentingan Nasional

Pada hakikatnya kepentingan nasional Indonesia adalah menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁶ Menurut Jack C Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional adalah *”the fundamental and ultimate determinant that guides the decision makers of a state in making foreign policy. The national Interest of a state is typically a highly generalize conception of those statement that constitute the state most vital needs, they include self preservation, independence, territorial, integrity, military security and economic wellbeing”*¹⁷. Kepentingan pada dasarnya merupakan factor penting yang menuntun pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara, unsur tersebut meliputi mempertahankan kelangsungan hidup, kemerdekaan, kedaulatan, keamanan, militer dan ekonomi.

Konsep kepentingan nasional adalah sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Selain itu Kepentingan Nasional merupakan alasan pembenar utama bagi tindakan suatu negara. Menurut Morgenthau kepentingan nasional didasarkan pada pengejaran

¹⁶ http://deplu.go.id/?category_id=27&news_id=1081&main-id=16. Diakses tanggal 14 Februari 2009

¹⁷ Jack C Plano and Roy Olton. *“The International Relatoin Dictionary”*. Newyork: Winston-Inc. 1996. Hal 128.

kekuasaan.¹⁸ Setiap negara di dunia memiliki dorongan untuk mengejar kekuasaan. Pemikiran Morgenthau didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. Ia menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama. Kemampuan minimum negara-bangsa adalah melindungi identitas fisik, politik dan kulturalnya dari gangguan negara-bangsa lain. Lebih spesifik negara-bangsa harus bisa mempertahankan integritas baik teritorial, rezim ekonomi politiknya, serta memelihara norma-norma etnis, religious, linguistik dan sejarahnya.

Usulan Indonesia dalam forum G-20 mengenai mekanisme *Global Expenditure Support Fund* didasarkan pada kepentingan ekonomi yaitu untuk menjaga kondisi perekonomian karena dampak negatif dari krisis global yang terlihat dari menurunnya kegiatan perekonomian, melemahnya mata uang domestik serta berkurangnya volume ekspor dan impor maka diperlukan dana global dalam format GESF untuk menjaga pertumbuhan ekonomi domestik agar Indonesia dapat melakukan kebijakan antisipasi

¹⁸Morgenthau, Hans J. 1985. "*Politics Among Nations*" T.A Columbus dan J.H Wolfe, Introduction to International Relations. England: Prentice Hall

krisis (*counter cyclical policy*). Sehingga kondisi perekonomian Indonesia mampu bertahan dalam kondisi krisis global.

2. Collective Bargaining

Dalam ekonomi Politik Internasional dikenal beberapa perspektif yang berkembang yaitu merkantililis, liberalis, radikal, dan reformis¹⁹ dimana banyak strategi perjuangan dunia ketiga diilhami oleh perspektif ini. Dalam kaitannya dengan permasalahan yang penulis bahas, perspektif reformis dianggap menjelaskan tentang upaya Indonesia dalam forum G-20 sebagai forum informal dalam lingkup internasional. Perspektif yang dikenal sebagai konsepsi Tata Ekonomi Internasional Baru (TEIB) memandang bahwa hubungan ekonomi internasional sekarang ini merugikan pihak yang lebih lemah, namun mereka percaya bahwa keadaan tersebut bisa diubah sehingga menguntungkan semua pihak asalkan dilakukan reformasi struktur hubungan ekonomi internasional. Dalam proses restrukturisasi ini pemerintah Negara kurang berkembang harus aktif ikut campur dan mengambil inisiatif dalam kegiatan ekonomi luar negeri. Mereka harus aktif untuk memanfaatkan organisasi internasional untuk melakukan "*bargaining*" dengan pemerintah Negara Industri Maju dan dengan kapitalis Internasional. Jadi yang penting adalah berusaha menciptakan tatanan baru untuk mengatur hubungan ekonomi sehingga Negara-negara kurang berkembang bisa memperoleh hasil yang adil dari

¹⁹ Dikutip dari buku Dr. Mohtar Mas' oed. "*Ekonomi Politik Internasional*" Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2003. Hal. 32

perdagangan luar negeri. Agar reformasi hubungan internasional itu bisa efektif maka harus ada “*collective self-reliance*” dan “*collective bargaining*”²⁰ yaitu kerjasama efektif antara semua Negara yang terlibat melalui suatu organisasi yang berfungsi demi kepentingan Negara kurang berkembang.

Dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang dibahas forum G-20 menjadi forum diskusi dan kerjasama bagi Negara maju serta berkembang untuk memfasilitasi seluruh kepentingan Negara yang terlibat, baik Negara maju dan khususnya Negara berkembang. Sehingga tercipta suatu tatanan ekonomi baru yang adil bagi Negara berkembang. *Collective bargaining* ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mengusulkan GESF. Indonesia secara aktif melakukan *bargaining* dengan mengusulkan *Global Expenditure Support Fund* dalam forum G-20, Di mana GESF tersebut adalah upaya Indonesia sebagai Negara berkembang yang turut terkena dampak krisis global untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya dalam menghadapi krisis global terutama untuk menjaga perekonomian domestik. Secara kolektif usulan tersebut diterima., hal ini berarti upaya Indonesia untuk mengusulkan GESF tersebut mendapatkan dukungan dari negara maju dan berkembang yang turut serta dalam forum tersebut dan dapat segera diimplementasikan, khususnya untuk membantu Negara berkembang yang turut terkena dampak krisis global.

²⁰ Ibid. Hal.57

F. Hipotesa

Indonesia mengusulkan mekanisme *Global Expenditure Support Fund (GESF)* dengan memanfaatkan *collective bargaining* melalui forum KTT G-20 karena memiliki kepentingan ekonomi, yaitu untuk menjaga pertumbuhan ekonomi domestik dan memperoleh sumber-sumber pendanaan menghadapi krisis global.

G. Jangkauan Penelitian

Tulisan ini akan membahas mengenai kepentingan Indonesia sebagai negara berkembang dengan *emerging markets* dan satu-satunya negara ASEAN yang turut serta dalam forum KTT G 20 yang dilaksanakan di Washington DC pada 15 November 2008.

H. Metodologi Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah berdasarkan pada penelitian kepustakaan (*Library research*). Data-data yang akan digali dari beberapa sumber, yaitu:

1. Buku-buku ilmiah dan hasil penelitian
2. Majalah, buletin, surat kabar, internet dan media lainnya yang relevan dengan obyek penelitian.

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif

I. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan yang didalamnya akan membahas mengenai

Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Teoretik, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

- BAB II : Mengungkap mengenai Deskripsi umum tentang G 20, Meliputi; Sejarah berdirinya G 20, Keanggotaan G-20 Kursi dan Manajemen Troika, Tujuan dan program kerja Pertemuan dan Kegiatan G-20 yang meliputi pertemuan Sao Paulo dan KTT G-20 di Washington D.C
- BAB III : Mengungkap mengenai Usulan Indonesia mengenai mekanisme Global Expenditure Support Fund dalam KTT G-20 di Washington D.C, Mekanisme Global Expenditure Support Fund dan kesepakatan dalam Deklarasi KTT G 20
- BABIV : Menjelaskan kepentingan Indonesia di G-20 Meliputi, Dampak Krisis secara global, Dampak Krisis global terhadap perekonomian Indonesia, dan kepentingan indonesia mengusulkan *Global Expenditure Support Fund* (GESF) sebagai upaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi domestik, serta untuk memperoleh sumber-sumber pendanaan menghadapi krisis global.
- BAB V : Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN